

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA HILIMBOWO DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA HILIMBOWO KECAMATAN ULUGAWO

Oleh :

Amualago Zai <sup>1)</sup>

Doli Tua Mulia Raja Panjaitan <sup>2)</sup>

Luksiana Maria Lingga <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung <sup>1,2,3)</sup>

E-mail

[amualagozai04@gmail.com](mailto:amualagozai04@gmail.com) <sup>1)</sup>

[dolipanjaitan@gmail.com](mailto:dolipanjaitan@gmail.com) <sup>2)</sup>

[luksianamaria@mail.com](mailto:luksianamaria@mail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Desa Hilimbowo dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi di Desa Hilimbowo, Kecamatan Ulugawo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima program pemerintah Desa Hilimbowo yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari lima program tersebut, dua program pemberdayaan yaitu ekonomi di bidang usaha kreatif dan pengelolaan hasil pertanian, berhasil dilaksanakan dengan baik. Namun tiga program lainnya yaitu pemberdayaan ekonomi di bidang pertanian organik, usaha peternakan, dan pariwisata desa, masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor internal, seperti kurangnya perhatian dari pemerintah desa, serta faktor eksternal, seperti keterbatasan anggaran untuk mendukung masyarakat desa.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

## ABSTRACT

*This research aims to highlight the policies implemented by the Hilimbowo Village government in increasing economic empowerment in Hilimbowo Village, Ulugawo District. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. Data was obtained through interviews, documentation and observation. The results of the research show that there are five Hilimbowo Village government programs which aims to increase community economic empowerment. Of the five programs, two, namely economic empowerment programs in the fields of creative business and management of agricultural products, were successfully implemented well. However, the other three programs, namely economic empowerment in the fields of organic agriculture, livestock business, and village tourism, are still not optimal. This is caused by internal factors, such as lack of attention from the village government, as well as external factors, such as limited budgets to support village communities.*

*Keywords Policy Implementation, Community Economic Empowerment*

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah Desa adalah bagian dari sistem pemerintahan nasional yang fokus pada pengelolaan di tingkat pedesaan. Pemerintahan Desa melibatkan proses di mana upaya-upaya masyarakat

desa digabungkan dengan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Maria Eni Surasih, 2017).

Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam mengelola Proses sosial di masyarakat. Tujuan utama mereka adalah menegakkan prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat dan memberikan pelayanan sosial yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan , ketentraman , dan keadilan masyarakat .

Penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pengakuan terhadap posisi desa serta menetapkan peraturan pelaksanaan untuk mengatur desa. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, harus dijadikan pedoman & dilaksanakan sesuai ketentuan. Pengelolaan urusan pemerintah di bidang desa ditentukan dengan pembentukan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015. serta percepatan pembangunan daerah tertinggal dan

Peraturan Kepala Desa Hilimbowo Nomor 5 Tahun 2024 mengatur tentang kewenangan Desa Hilimbowo dalam upaya meningkatkan pemberdayaan

Menurut hasil penelitian, ada beberapa masalah di Desa Hilimbowo, Kecamatan Ulugawo, terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masalah-masalah tersebut meliputi: tidak adanya bantuan benih atau bibit untuk pertanian, peternakan, dan perkebunan dari pemerintahan Desa Hilimbowo; kurangnya fasilitas untuk pengelolaan dan pengembangan agrowisata; serta tidak adanya dukungan untuk pembentukan sanggar seni dan budaya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Implementasi Kebijakan Pemerintahan Desa

Implementasi adalah tindakan atau Pelaksanakan rencana yang telah diputuskan dengan hati - hatian dan akurat . Implementasi dapat dipahami sebagai rencana penerapan yang sesuai , secara langsung .sebagaimana rencana

transmigrasi. Kebijakan pemerintah terkait desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. akibat status desa sebagai entitas pasif yang bermasyarakat yang ingin dikembangkan guna mencapai tujuan nasional , maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa haruslah mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku mengenai permutasi dan kombinasi. Kebijakan pengelolaan desa menyatakan bahwa desa, baik yang disebut desa adat atau dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tetap dan tunduk pada urusan pemerintahan serta dinyatakan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Desa berfungsi berdasarkan prakarsa masyarakat, hak bawaan dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

ekonomi masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi warga Desa Hilimbowo.

penerapannya , dengan cara yang lugas. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi merujuk pada pelaksanaan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok, baik dalam pemerintahan maupun sektor swasta, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab 2014:65) dalam penelitian Anuar Solikhin (2016). yang menyatakan bahwa implementasi melibatkan tindakan individu , kelompok, atau pejabat ,, baik dari pemerintah maupun sektor swasta , dengan Tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan .

### 2.2. Defenisi Implementasi Kebijakan

Kebijakan adalah sebuah pernyataan atau dokumen yang memberikan informasi umum tentang pemahaman suatu bidang tertentu serta panduan dan arahan umum bagi setiap

individu untuk diikuti .Dari segi etimologi , kebijakan berasal dari " policy". Kebijakan juga dapat diartikan sebagai serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

### 2.3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa diartikan sebagai sekelompok individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan wewenang, pelaksanaan kepemimpinan, serta koordinasi pemerintahan dan pembangunan masyarakat melalui lembaga tempat mereka beroperasi. Menurut Syafii'e, secara etimologis, pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tertib berarti melaksanakan pekerjaan dengan perintah, yang melibatkan dua pihak: pihak yang memberi perintah memiliki wewenang, sedangkan pihak yang menerima perintah memiliki kewajiban untuk mematuhi.

b. Dengan penambahan tambahan huruf " pe ", kata tersebut menjadi pemerintah " , yang menunjukkan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan. Jika huruf " an " tambahan di akhir, menjadi " pemerintahan " yang mengacu pada tindakan , perilaku, dan sikap yang dilakukan oleh pemerintah .

### 2.4. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa , sering dikenal sebagai PemDes , adalah, organisasi pemerintah yaitu yang berkomitmen penuh terhadap pengembangan wilayah di tingkat desa .sama sekaliber komitmen terhadap pengembangan wilayah di tingkat desa . Struktur dan asosiasi resmi terdiri dari kepala Desa (atau kepala desa ), perangkat Desa ( seperti staf administrasi dan sekretaris ) , dan Organisasi perwakilan Desa , seperti Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ).

### 2.5. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Kebijakan ini biasanya berbentuk keputusan yang telah dipertimbangkan dengan matang dan hati oleh pengambil keputusan tertinggi, dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat rutin, berulang, atau terikat pada aturan keputusan.

Salah satu langkah yang dapat diambil agar Desa Hilimbowo berkembang dan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya meningkat adalah dengan mendirikan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan didirikan oleh masyarakat Desa dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa melalui pemanfaatan sumber daya alam, potensi sosial, dan potensi ekonomi yang ada di Desa. BUMDes dapat berbentuk koperasi, perseroan terbatas (PT), atau jenis usaha lainnya. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha BUMDes dapat digunakan untuk mendanai pembangunan Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan dukungan berupa pelatihan, bantuan modal, dan akses pasar untuk mendukung pembentukan BUMDes.

Tujuan utama pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian Desa serta kesejahteraan masyarakat Desa. Selain itu, tujuan khusus yang ingin dicapai dengan adanya BUMDes antara lain::

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan memanfaatkan SDA, potensi sosial, dan potensi ekonomi yang ada di Desa.
2. Memperkuat kemandirian ekonomi Desa melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa.
3. Memperluas akses masyarakat Desa terhadap lapangan kerja dan peluang usaha, sehingga dapat membantu mengurangi tingkat

pengangguran dan kemiskinan di Desa.

4. Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat Desa dalam pembangunan ekonomi Desa, guna meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha.
5. Membangun dan memperkuat hubungan kerja sama antara BUMDes dan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta, untuk mendukung pengembangan usaha di Desa.

## 2.6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat atau Tujuan sasaran pembangunan ekonomi massal adalah untuk meningkatkan kapasitas dan potensi setiap komunitas sehingga mereka dapat mengembangkan identitas, nilai, dan hubungan mereka secara optimal sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu.

pemberdayaan dikenal dengan istilah merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan kekuasaan Anwas (2014:48). Pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai upaya untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri melalui pengembangan potensi dan kemampuan mereka sendiri. Sementara itu, Suharto (2017:58) menyatakan bahwa pemberdayaan merujuk pada peningkatan kemampuan individu, terutama kelompok yang rentan, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar mereka,
- b. Mengakses sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatan mereka,
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan serta dalam berbagai

keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

## 2.7. Faktor Pendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Ada empat faktor yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat Menurut Hutomo (2017), antara lain

### a. Sumber Daya Manusia

faktor paling penting dalam terpenting dalam program pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia oleh karena itu diperlukan pengembangan lebih lanjut di bidang ini. Contohnya adalah karyawan atau pegawai yang berperan dalam membantu operasional perusahaan. Selain itu, ada juga tenaga kerja yang tidak terdidik dan terlatih, yaitu mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan tertentu.

### b. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam mencakup segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan standar hidup bagimasyarakat umum dan memenuhi kebutuhan mereka. di dalamnya termaksud sumber daya hutan, air, dan luas permukaan tanah.

### c. Pemodalan

Pemodalan adalah aspek yang sering dihadapi masyarakat. Namun, penting untuk memperhatikan cara pemberian modal agar tidak menimbulkan ketergantungan dan dapat mendukung UMKM agar lebih berkembang.

### d. Prasarana Produksi dan Pemasaran

Aspek ini sangat penting untuk mendorong produktivitas dan perkembangan usaha. Kegiatan produksi akan menjadi tidak efektif jika produk tersebut tidak dapat dipasarkan dengan baik. Oleh karena itu, keberadaan prasarana produksi dan pemasaran merupakan salah satu faktor utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat dan UMKM dapat tercapai jika

terdapat fasilitas transportasi yang memadai untuk menghubungkan tempat produksi dengan pasar, sehingga dapat mengurangi rantai pemasaran.

### **2.7.3. Indikator-Indikator Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat mencakup berbagai inisiatif non-instruksional dan fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, mereka dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, mengenali potensi yang dimiliki, serta merencanakan dan menyelesaikan permasalahan tersebut (Menkes RI No. 65 Tahun 2013).

Suharto (dalam Hutomo, 2017:103) menjelaskan bahwa Karakteristik berikut ini dapat dijadikan tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang harus sejalan dengan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat : perekonomian , pendidikan, dan kesehatan dalam kehidupan sehari - hari masyarakat tidak lepas darikebutuhan hidup . kebutuhan adalah ekonomi yang berhubungan dengan kualitas kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat umum , sedangkan kebutuhan pendidikan terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan.

a. Peningkatan Pendapatan Masyarakat  
Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat. Contohnya, jika petani mampu meningkatkan hasil panennya, maka pendapatan bulanan mereka juga akan bertambah.

b. Partisipasi dalam Pembangunan  
Penguatan masyarakat juga tercermin dalam partisipasi dalam pembangunan desa, seperti pembangunan infrastruktur. Partisipasi tersebut berupa sumbangan gagasan dan pemikiran, pemberian dana,

dan dukungan terhadap proyek pembangunan desa.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Pada tanggal 5 Juni hingga 28 Juni 2024 Penelitian Dilakukan di Kantor Kepala Desa Hilimbowo, Jalan Hilifosu No. 10, Kecamatan Uluwigawo. Metode analisis yang digunakan disebut analisis kualitatif . hasil penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, dengan fokus pada objek yang alami sesuai dengan kejadian yang telah atau belum terjadi di lapangan. Jenis jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian studi kasus , dengan tujuan memberikan gambaran keseluruhan dari berbagai data yang dikumpulkan secara objektif berdasarkan fenomena yang terjadi ( Sugiono , 2017 ) .

#### **□ Data Primer**

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh secara diam-diam melalui observasi atau kerja lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data alat pengumpulan atau sumber dari objek atau lokasi studi .

#### **□ Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara cepat dan langsung berkaitan dengan objek penelitian . informasi ini adalah data terbuka data berasal dari buku atau dokumen yang relevan dengan objek atau lokasi studi .

informan adalah individu yang memiliki pengetahuan atau terlibat langsung dalam masalah yang diteliti. Informasi yang diberikan adalah informasi yang mereka yakini relevan untuk memberikan informasi tentang tindakan yang diambil oleh pemerintah Desa Hilimbowo dalam rangka meningkatkan kondisi ekonomi penduduk lokal di Desa Hilimbowo , Kecamatan Uluwigawo .

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Sejarah Desa Hilimbowo**

Desa Hilimbowo terletak di Kecamatan Ulugawo, Kabupaten Nias, dan terdiri dari VII Dusun dengan total penduduk sebanyak 1.071 jiwa dan 220 kepala keluarga. Luas wilayah Desa Hilimbowo secara keseluruhan mencapai 35 km<sup>2</sup>, dengan sebagian wilayah seluas 5 km<sup>2</sup> telah digunakan untuk perumahan dan pertanian. Ketinggian tanah dari permukaan diperkirakan sekitar 1.325 meter. Desa Hilimbowo berbatasan di:

- a. Desa Fatodano di sebelah utara,
- b. Desa Holi di sebelah selatan
- , c. Desa Hilibadalu di sebelah barat,
- d. Desa Orahili di sebelah timur.

No	Jenis Kelamin	Total	Persen
1	Pria	476	44,45
2	Wanita	595	55,55
<b>Total</b>		1.071	100

**Sumber : Kantor Desa Hilimbowo (2024)**

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa komposisi penduduk Desa Hilimbowo terdiri dari laki-laki sebanyak 44,45% dan perempuan sebanyak 55,55%. Perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam desa ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan.

#### 4.2. Hasil Penelitian

##### 4.2.1 implementasi kebijaksanaan pemerintahan Desa Hilimbowo

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya dari pemerintah Desa untuk memperbaiki kondisi masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan.

Setelah mendirikan BUMDes, Kepala Desa Hilimbowo melaksanakan beberapa program tambahan untuk

meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Hilimbowo, Kecamatan Ulugawo, yaitu pertama Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Bidang Pertanian Organik Pertanian organik merupakan salah satu program BUMDes yang menjanjikan, termasuk dengan membentuk kelompok tani di kalangan masyarakat desa. Pertanian organik tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian tetapi juga membantu menjaga keberlanjutan lingkungan. Program ini memanfaatkan lahan yang tersedia di desa untuk mencapai tujuannya. Kedua Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Bidang Usaha Ternak. Program BUMDes selanjutnya yang memiliki potensi besar adalah usaha ternak. Masyarakat desa dapat memanfaatkan lahan kosong untuk memulai usaha ternak, seperti sapi, babi, kambing, dan ayam jumbo. Dalam program ini, BUMDes dapat berperan dalam menyediakan bibit serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas ternak. Ketiga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dibidang Wisata Desa Program wisata desa adalah salah satu inisiatif menarik dari BUMDes. Desa Hilimbowo, dengan adanya air terjun Hando-Hando dan keunikan lainnya, memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisatawan. BUMDes dapat mendukung masyarakat desa dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan cara seperti membangun homestay, menyediakan makanan khas, atau menawarkan fasilitas wisata lainnya. Keempat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dibidang Usaha Kreatif Program BUMDes berikutnya adalah usaha kreatif. Masyarakat desa dapat mengembangkan berbagai usaha kreatif, seperti kerajinan tangan, melukis, menjahit, atau produk unik lainnya. BUMDes dapat mendukung pemasaran produk-produk tersebut untuk meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak konsumen. Kelima Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Bidang Pengelolaan Hasil Pertanian. Pengelolaan

hasil pertanian merupakan program BUMDes berikutnya. Masyarakat desa dapat mengolah hasil pertanian menjadi produk dengan nilai tambah, seperti padi, keripik, atau cabai. BUMDes dapat membantu dengan menyediakan peralatan dan pelatihan untuk proses pengolahan tersebut.

#### **4.2.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintahan Desa Hilimbowo Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Hilimbowo Kecamatan Ulugawo**

Pemberdayaan ekonomi penduduk merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dalam menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan standar hidup, kemandirian, dan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan partisipasi swadaya masyarakat. Studi ini berfokus pada Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Hilimbowo dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi penduduk lokal di wilayah Ulugawo dengan meningkatkan rasa memiliki penduduk. Beberapa strategi yang disarankan antara lain adalah dengan melakukan pemotongan dan penebangan desa untuk dipresentasikan kepada kelompok usaha, meminta bantuan dari pihak terkait yang memiliki keahlian ekonomi untuk menjadi mentor pelatihan usaha, dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum, khususnya pemilik usaha, dengan cara membandingkan praktik dari daerah lain untuk memberikan contoh pertumbuhan usahanya. Pemerintah Desa mencari informasi dari dinas atau lembaga yang mendukung pembuatan peraturan perundang - undangan dan segera menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat umum tentang proses pembuatan peraturan perundang - undangan. Selain itu, pemerintah desa mengalokasikan BUMDes sesuai dengan

peraturan perundang - undangan yang berlaku dan memanfaatkan lahan yang tersedia serta prasarana sebagai tempat usaha. Mereka juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara bersaing dalam usaha dengan cara yang adil dan tidak merugikan orang lain, serta memastikan praktik yang benar dalam penggunaan pupuk dan pengolahan tanaman agar tidak mudah terkena penyakit.

#### **4.3.3. Faktor Penghambat Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Di Desa Hilimbowo, Kecamatan Ulugawo**

Pemerintah Desa Hilimbowo berharap agar program-program yang telah dirancang bersama perangkat desa berjalan sesuai rencana. Namun, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah Desa Hilimbowo untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Hilimbowo, Kecamatan Ulugawo, terdapat beberapa hambatan, yaitu: keterbatasan anggaran yang tersedia untuk modal bagi kelompok usaha, kurangnya pengetahuan dari pemerintah desa, rendahnya kesadaran masyarakat yang enggan membandingkan praktik dari desa atau daerah lain, serta minimnya pengetahuan pemerintahan desa mengenai pembuatan legalitas kelompok usaha karena mayoritas latar belakang pendidikan mereka hanya tamat SMA. Selain itu, ada juga keterbatasan sarana dan prasarana yang dapat dialokasikan untuk usaha, serta terbatasnya jaringan atau sinyal yang menghambat akses informasi secara cepat.

### **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Implementasi oleh pemerintah Desa Hilimbowo dalam meningkatkan

pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Hilimbowo, Kecamatan Ulugawo, masih belum mencapai hasil yang optimal.

b. Faktor penghambat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Hilimbowo meliputi anggaran yang tidak memadai, keterbatasan sarana dan prasarana desa, serta kekurangan dalam pelatihan yang diberikan.

## 6.DAFTAR PUSTAKA BUKU

Anwas (2014:48) Pemberdayaan (*Empowerment*) Konsep Yang Berkaitan Dengan Kekuasaan (*Power*).

Arikanto (2018:45) tentang subjek penelitian yang dituju oleh peneliti.

Cepta Hery & Wira Saputra Rahman (2023) "Implementasi Kebijakan Tentang Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi".

Guntur setiawan (2017) Berpendapat Bahwa Implementasi Sebagai Perluasan Aktivitas Yang Saling Menyesuaikan

Hamdi dan Irmayanti ( Dalam Putriannah, Ratnaningsih, Nurhayati, 2022) Metode Penelitian Kualitatif Adalah Metode Yang Bersifat Menjelajah Dan Lebih Mendalam

Hutomo (2017) Ada Empat Faktor Pendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

## JURNAL

Juliana, Dkk (1018), "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa"

Maharani & Figa fitrua (2020), " Implementasi Program Boarding School Dalam Pembentukan

Karakter Siswa Di SD Islam Miftahul Huda keringan Nganjuk"

Maria Eni Surasih, (2017) Mengemukakan tentang pengertian pemerintahan desa.

Cepta Hery & Wira Saputra Rahman (2023) dalam penelitiannya yaitu Kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah terkait desa tersebut diatas merupakan salah satu tujuan dalam mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia

George C. Edward III ( Leo Agustino 2008:194) dalam penelitian juliana, dkk (218)

Mulyadi ( 2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

Nugroho (2016:85) bahwa kebijakan pemerintah atau publik keputusan yang dibuat negara

Peraturan presiden Nomor 12 tahun 2015 dalam rangka membantu menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang desa

Panjaitan Raja Mulia Tua Doli, Laowo Yaaro Zai Widarman, (2022).146 stategi dinas ketenaga kerjaan dalam mengatasi pengangguran diprovinsi sumatera utara dampak covid-19

Rahayu Agustina (2014) Ananlisa Implementasi Program Otonomi Desa Dalam Pembangunan Sarana Olahraga Di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Schuler, hashemi dan Riley (2015) mengembangkan indikator pemberdayaan

Siti Taslimatul Umah (2019) dengan judul "pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kewirausahaan".

Sugiyono(2022) mendefenisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*



Suharno (2018:87) implementasi dikaitkan dengan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan

Suharto (Dalam hatu, 2017:103) menjelaskan tentang indikator pemberdayaan

Suhermanto (2020) dengan judul “ pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah”

Teori Merilee S.Grindle ( Dalam Harbani Paslong 2017:64) ada dua keberhasilan implementasi

Thomas R.Dye (2017) apapun yang dilakukan oleh pemerintah itulah adalah kebijakan publik

Timsus (2014) kebijakan sebagai prinsip yang mengatur tindakan

Van Meter dan Van Horn (Dalam Wahab 2014:65) dalam penelitian Anuar

Solikhin (2016) yang mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat

#### **Peraturan/Undang-undang**

Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014

Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2015 dalam rangka membantu menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang desa

Peraturan kepala Desa Hilimbowo Nomor 5 Tahun 2024 tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat

Peraturan pemerintahan daerah No. 23 tahun 2014

Undang-undang BUMdes pasal 87 ayat (1) UU nomor 6 Tahun 2014